



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDI BUKTI DJUFRIE**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **636632**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.810.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 3.045.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36564 m2/36564 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, WARISAN Rp. 4.147.500.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.837.500.000		
6. Tanah Seluas 534 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , LAINNYA Rp. 280.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>350.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>600.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>550.600.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.711.200.000</b>



III. HUTANG

Rp. 1.325.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 15.386.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.